

Siaran Pers

SOFIA JADI KATALISATOR KERJA SAMA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK WUJUDKAN KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA

JAKARTA (22/5) – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Pemerintah Swiss meluncurkan hasil survei inklusi keuangan perdana di Indonesia melalui acara **“Launching Results of the Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) Indonesia”**. Hasil SOFIA yang dilakukan terhadap 20.000 responden di empat provinsi di timur Indonesia (Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan), diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pembuat kebijakan, pelaku industri keuangan, donor, akademisi, maupun organisasi pembangunan, mengenai perilaku sebagian masyarakat Indonesia dalam menggunakan layanan keuangan, seperti produk simpan pinjam, asuransi, transfer dan pembayaran.

Penemuan terperinci dari SOFIA akan memberikan pemahaman yang lebih baik atas faktor-faktor yang mendorong penggunaan produk dan jasa keuangan di Indonesia, serta batasan yang dihadapi konsumen dalam mengakses layanan keuangan tersebut. Tidak hanya penting bagi institusi keuangan dalam merancang produk komersial yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, hasil SOFIA juga vital bagi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pembangunan keuangan inklusif. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SKNI), yang menargetkan sebesar 75 persen populasi dewasa harus dapat mengakses layanan keuangan formal pada 2019.

“Untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019, pemerintah telah menyiapkan lima pilar pendukung, yaitu: edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen. Untuk itu, informasi atas persepsi, sikap, dan perilaku keuangan orang Indonesia yang diperoleh dari SOFIA, menjadi krusial bagi kelima pilar ini untuk mewujudkan inklusi keuangan nasional. Tanpa adanya informasi dan analisis yang kredibel tentang kondisi keuangan masyarakat Indonesia, terutama yang belum tersentuh jasa perbankan, sulit dirancang pendekatan yang tepat sasaran,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro dalam sambutannya di acara peluncuran hasil SOFIA di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017. Lebih lanjut beliau mengatakan kelima pilar tersebut harus ditopang oleh tiga fondasi, yaitu: kebijakan dan regulasi yang kondusif, infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif.

SOFIA ini mengadopsi metodologi yang digunakan dalam survei *FinScope* yang telah dilakukan di lebih dari 25 negara. Metodologi ini menggunakan metode survei dari sisi permintaan (*demand-side survey*) yang sangat umum digunakan untuk mengukur akses keuangan di level individu. Secara mengejutkan, SOFIA mengungkapkan bahwa 41 persen populasi di keempat provinsi sudah menggunakan layanan perbankan, tetapi kurang dari setengah jumlah tersebut masih belum memiliki rekening bank sendiri. Selain itu, jumlah signifikan dari masyarakat yang aktif menggunakan layanan perbankan, masih menggunakan rekening bank milik keluarga ataupun temannya sendiri.

Di keempat provinsi, 31 persen masyarakat sudah menggunakan kombinasi layanan keuangan formal dan informal, dan setidaknya 10 persen yang masih bergantung pada layanan informal (terutama Jawa Timur). Diperoleh responden wanita cenderung belum menggunakan layanan perbankan dibandingkan pria. Wanita lebih banyak mengakses layanan informal dikarenakan partisipasi mereka dalam kelompok informal seperti arisan. Walau jumlah pengguna layanan formal tetap menggunakan layanan informal, hal ini tetap membuka kesempatan bagi penyedia layanan keuangan formal untuk memahami nilai tambah mereka dibanding opsi informal yang tersedia.

“Kami melihat penemuan SOFIA sebagai kunci pemahaman bagaimana kelompok berbeda di Indonesia mengatur kehidupan finansialnya – termasuk perbedaan antara pria dan wanita, kelompok umur berbeda, aktivitas ekonomi dan sumber pendapatan, di lokasi perdesaan dan di perkotaan. Kami berharap temuan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai inklusi keuangan secara nasional, dan juga bagi institusi keuangan dalam mengembangkan produk yang disesuaikan untuk masyarakat miskin,” jelas *Minister-Counsellor for Governance and Human Development* Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Fleur Davies.

SOFIA juga mengindikasikan bahwa secara keseluruhan layanan keuangan semi-formal membatasi penetrasi dan memberikan kontribusi minimal pada tingkat inklusi keuangan. Termasuk di dalamnya produk yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam, dan skema kredit pemerintah yang tidak dilaksanakan melalui jalur sistem perbankan. “Data yang dikumpulkan di dalam SOFIA menawarkan kesempatan yang lebih besar untuk sektor keuangan. Hal ini memberikan informasi tangan pertama bagi bank untuk merancang potensi produk keuangan baru, yang memungkinkan masyarakat mengoptimalkan pelayanan keuangan yang aman, mudah diakses, dan terjangkau,” ujar *Head of Swiss Economic Cooperation Office (SECO)* Kedutaan Besar Swiss di Jakarta, Martin Stottele.

Dalam akhir sambutannya, Menteri Bambang menyampaikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang mendukung SOFIA. “Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarannya kepada Pemerintah Australia, Pemerintah Swiss, serta *Oxford Policy Management* atas komitmen dan kerja sama yang sangat baik dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan SOFIA. Juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Mandiri, dan Bank BNI atas segala masukannya untuk penyempurnaan desain SOFIA. Saya berharap temuan SOFIA ini dapat menjadi katalisator kerja sama antar pemangku kepentingan inklusi keuangan sehingga seluruh pihak dapat bersama-sama mewujudkan akses keuangan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Menteri Bambang.

Menteri Bambang juga mendorong survei dilakukan secara berkelanjutan. “SOFIA dapat memberikan manfaat lebih apabila terus dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, misalnya setiap dua atau tiga tahun sekali. Dengan demikian, perkembangan indikator keuangan inklusif dapat terus dipantau sehingga efektivitas kebijakan maupun inisiatif keuangan inklusif dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan,” pungkask beliau.

Tentang SOFIA:

Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) adalah proyek survei yang didanai Pemerintah Australia dan Pemerintah Swiss, dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas. SOFIA mengukur dan menggambarkan tingkat akses penggunaan layanan keuangan oleh populasi dewasa dari berbagai lingkup pendapatan dan demografis. Hasil SOFIA memberikan informasi vital sebagai langkah awal untuk mencapai Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SKNI) yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2016, dan memberikan bantuan terhadap institusi keuangan untuk memperluas basis konsumernya.

Jakarta, 22 Mei 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650;
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id